

Bab IV
KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN UNTUK INDONESIA
2000 - 2009

Bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Jerman untuk Indonesia yang dibatasi pada periode 2000 – 2009. Kebijakan luar negeri Jerman yang akan dibahas dalam bab ini akan disesuaikan dengan data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, di mana Jerman mengklasifikasikan kebijakannya untuk Indonesia ke dalam 4 fokus. Fokus tersebut antara lain 1) Kebijakan politik, 2) kebijakan ekonomi dan perdagangan, 3) kebijakan pembangunan, dan 4) kebijakan S&T. Ulasan tentang kebijakan luar negeri Jerman untuk Indonesia ini berfungsi untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian yang mempertanyakan mengapa Jerman meningkatkan bantuan kerjasama S&T terhadap Indonesia.

Hubungan yang terjalin antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia dapat ditelusuri melalui sejarah pada abad ke-15. Orang Jerman pertama yang mengunjungi negara kepulauan di Samudra Hindia pada 1506 adalah Balhasar Sprenger dari Kamar Dagang Welser di kota Augsburg. Kemudian banyak dokter, petualang, ilmuwan, pedagang, misionaris, penulis dan seniman yang kemudian mengikuti jejak Sprenger dan menetap di Indonesia. Salah satu gubernur Batavia yang paling dikenal adalah Wilhelm Gustav van Imhoff (1705-1750). Imhoff adalah orang Jerman yang membangun kota Bogor. Sedangkan Casper Georg Carl Reinwardt (1733-1854) adalah ilmuwan Jerman yang merancang Kebun Raya Bogor¹.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Jerman memandang bahwa penting untuk membuka diri bagi bangsa lain. Sehingga pada tahun 1950 hingga 1970an Jerman memilih politik terbuka² yang berarti bahwa semua negara adalah teman

¹http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/03/Bilaterale_Beziehungen/seite_geschichte_beziehungen.html yang diakses pada tanggal 1 November 2010 pukul 22.06 ib.

² Politik terbuka bukanlah sebuah gerakan atau hasil tetapi merupakan sebuah komitmen terhadap proses perubahan – demokrasi, kemanusiaan dan perdamaian – yang dipercayai ada dan sedang diperjuangkan oleh dunia. Politik terbuka berada dalam „paradoks demokrasi“. Politik terbuka juga mencari cara untuk menyelesaikannya dengan memahami dan memperjelas hubungan

dan saudara. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh rasa keingintahuan Jerman yang besar terhadap negara lain. Sejalan dengan politik terbuka itu, pemerintah Jerman menerapkan kebijakan untuk memberikan pendidikan tanpa biaya bagi seluruh warga negara Jerman dan warga negara asing yang ingin menempuh pendidikan di Jerman. Kebijakan tersebut rupanya menarik minat banyak mahasiswa yang juga berasal dari Indonesia. Para alumni Jerman yang kembali ke Indonesia dengan keahlian yang mereka pelajari di sana turut mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia yang baru berdiri. Para insinyur dan ilmuwan muda yang pernah belajar di Jerman juga memainkan peran penting dalam menjembatani kerjasama dalam bidang S&T, yang salah satunya dipelopori oleh BJ. Habibie.

Hubungan diplomatik antara pemerintah Jerman dan Indonesia secara resmi dibuka pada 1952. Secara politik, Jerman konsisten dalam mendukung stabilitas, integritas wilayah dan kesatuan negara Indonesia serta menyambut baik usaha-usaha Indonesia dalam menyelesaikan konflik dalam negeri melalui dialog dan negosiasi. Jerman juga terus berkomitmen dalam membina kerjasama ekonomi dan perdagangan yang dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor maupun peningkatan kegiatan investasinya di Indonesia.

Jerman melihat Indonesia sebagai negara yang kaya akan bahan baku mineral, seperti gas bumi, batubara, minyak, timah, nikel, tembaga, bauksit serta emas. Indonesia juga memiliki sumber daya hutan dan laut yang besar serta kaya akan sumber daya pertanian, seperti gula, beras, coklat, teh, kopi, dan tembakau³. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 250 juta jiwa, tidak mengherankan jika Indonesia memiliki potensi pasar yang juga sangat besar. Kekayaan lain yang juga dimiliki oleh Indonesia adalah keragaman suku, budaya, bahasa serta agama. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dilihat sebagai negara yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, yang salah satunya ditunjukkan dengan dijalankannya prinsip

antara pengalaman beragam warga negara dalam kaitannya dengan kekuatan di dunia. http://www.opendemocracy.net/democracy-open_politics/article_2378.jsp diakses pada 14 Juli 2010 pada pukul 16.00 wib.

³ <http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/Indonesien/Wirtschaft.html> yang diakses pada 26 Oktober 2010 pada pukul 23.21 wib.

kebebasan memeluk suatu agama bagi setiap penduduk Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim, namun mereka dapat hidup berdampingan dan hidup rukun dengan penduduk beragama lain secara harmonis. Melalui kerjasama yang dibina selama ini dengan Indonesia, Jerman dapat menunjukkan kepada dunia bahwa negara Barat dapat melakukan kerjasama dengan harmonis dengan negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Muslim⁴ (Dortans dan Stienen, 2010).

Stabilitas keamanan di Indonesia memasuki masa sulit ketika terjadi krisis keuangan yang melanda kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia pada 1997/1998. Krisis keuangan berdampak sistemik karena mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Dampak politik dapat dilihat melalui demonstrasi besar-besaran yang menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah diduduki selama kurang lebih 32 tahun. Dampak ekonomi lainnya dapat dilihat dari meroketnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar AS, di mana hal tersebut secara langsung berdampak pada jumlah utang luar negeri Indonesia. Besarnya utang luar negeri yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta mengharuskan Indonesia untuk menjual sebagian aset strategisnya kepada pihak asing untuk menutupi defisit dalam anggaran tahunannya (Jemadu, 2008:81). Stabilitas keamanan di Indonesia masih terus diuji dengan terjadinya serangkaian kejadian peledakan bom oleh pelaku terorisme di beberapa tempat di Indonesia, menyusul aksi terorisme yang terjadi pada 11 September 2001.

Indonesia juga dihadapkan pada situasi yang cukup sulit ketika terjadi berbagai bencana alam El Nino⁵ yang melanda Indonesia pada 1997/1998.

⁴ Pernyataan ini dikemukakan oleh Dr. Peter Dortans, *Managing Director VDI|VDE|IT* pada interview yang dilakukan tanggal 10 Juni 2010. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Dr. Christian Stienen dari BMBF pada interview yang dilakukan tanggal 17 Juni 2010. Dr. Stienen adalah Direktur kerjasama untuk kawasan Asia dan Pasifik dari BMBF (Kementerian Federal bidang Pendidikan dan Penelitian).

⁵ El Nino merupakan fenomena global dari sistem interaksi dan atmosfer yang ditandai dengan memanasnya suhu muka laut di Pasifik Ekuator atau anomali suhu di muka laut di daerah tersebut positif. Fenomena El Nino akan menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan berkurang tergantung dari intensitas El Nino tersebut. Namun karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim, maka tidak seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena El Nino.

Bencana El Nino tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di kawasan Indonesia yang disebut-sebut sebagai kebakaran hutan paling hebat di dunia, di mana masalah yang sama terulang kembali pada 2002⁶. Bencana alam lainnya yang juga cukup hebat yaitu tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang melanda Aceh dan kawasan yang terletak di kawasan Samudera Hindia. Total korban jiwa bencana tsunami pada 2004 itu adalah sebanyak 225.000 jiwa yang berasal di daerah-daerah yang berada di kawasan Samudera Hindia. Sedangkan Aceh sebagai kawasan yang sangat dekat dengan pusat gempa mengalami kerusakan yang cukup parah.

Dinamika politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia secara berturut-turut paska krisis keuangan 1997/1998 tersebut di atas, ternyata tidak mengurangi minat pemerintah Jerman untuk tetap membina hubungan persahabatan dengan Indonesia. Meskipun pemerintah Jerman sempat mengeluarkan *travel warning* kepada warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia karena situasi keamanan yang tidak kondusif, namun secara politik dan ekonomi, pemerintah Jerman tetap menunjukkan komitmennya untuk tetap berada di samping Indonesia dan untuk tidak meninggalkan Indonesia pada saat mengalami keterpurukan. Begitu juga ketika B.J. Habibie tidak lagi menduduki jabatan di pemerintahan, di mana dia adalah salah satu aktor yang memiliki peran besar dalam hubungan kedua negara, namun Jerman tetap berkomitmen untuk tetap memelihara hubungan baik yang sudah terbina selama ini. Komitmen politik tersebut misalnya ditunjukkan melalui kunjungan kenegaraan Kanselir Jerman Gerhard Schröder ke Indonesia pada 2003⁷ dan bertemu dengan mantan Presiden Megawati, serta kunjungan Menteri Luar Negeri Steinmeier pada 2008, di mana pada kesempatan tersebut ia bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, komitmen Jerman dapat dilihat melalui perusahaan-perusahaan Jerman yang tetap beroperasi pada saat Indonesia dilanda krisis keuangan. Saat ini terdapat kurang lebih 250 perusahaan Jerman membuka cabang di Indonesia. Dalam kerjasama

⁶ Luca Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, (Bogor: Center for International Forestry Research, 2003) hal. v.

⁷ <http://bkpm.org/hubunganbilateral.htm> yang diakses pada 7 Juni 2010 pada pukul 09.00 wib.

pembangunan, komitmen Jerman ditunjukkan dengan tetap memberikan bantuan keuangan kepada Indonesia untuk membiayai berbagai macam proyek kerjasama yang diajukan Indonesia yang disesuaikan dengan fokus kebijakan luar negeri Jerman dalam bidang ini, serta penawaran skema bantuan *dept swap*⁸ oleh Jerman kepada Indonesia. Begitu juga dengan kerjasama dalam bidang S&T. Sebagaimana yang kita ketahui, BJ. Habibie adalah aktor yang memiliki peran besar khususnya dalam kerjasama S&T dengan Jerman. Ketika dia dipaksa turun dari kursi pemerintahan pada 1999, dunia teknologi Indonesia seperti kehilangan arah. Apresiasi terhadap S&T mulai mundur⁹. Hal ini selain karena tekanan yang terjadi akibat krisis keuangan, namun juga disebabkan oleh pilihan prioritas pemerintah Indonesia untuk memulihkan situasi perekonomian negara serta adanya gerakan dehabibienisasi¹⁰. Kenyataan tersebut nyatanya tidak merubah komitmen Jerman untuk tetap melanjutkan kerjasama S&T dengan Indonesia. Jerman justru meningkatkan bantuannya dalam kerjasama tersebut, yakni sebesar 87.113.000,- EURO pada periode 2000 – 2009, di mana pada periode 1990 – 1999 jumlah bantuan kerjasama S&T untuk Indonesia hanya sebesar 37.493.867,-.

Brown (2001:16) menyebutkan bahwa dalam wacana resmi, negara (*state*) diibaratkan seperti orang (*person*) yang memiliki kepentingan (*interest*) dan mampu berperan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam *The Mission Statement of Foreign Commonwealth Office*, Inggris, antara lain keamanan, kesejahteraan, kualitas hidup serta saling menghormati (*security, prosperity, quality of life, mutual respect*).

Teori etika dalam kebijakan luar negeri ini akan digunakan untuk menganalisa tentang kebijakan luar negeri Jerman untuk Indonesia pada periode 2000 – 2009.

⁸ *Dept swap* adalah suatu mekanisme finansial internasional yang bertujuan untuk mengurangi sebagian utang luar negeri debitur dengan cara menggantikannya dengan komitmen lain (biasanya berbentuk investasi di sektor swasta, program sosial, pembangunan, konservasi sumber daya alam) yang dibiayai oleh mata uang lokal.

⁹ Nur Mahmudi Ismail dan Mulyanto, *Iptek Nasional paska Habibie*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), hal. ix.

¹⁰ *ibid*

4.1. Kebijakan Politik

Sebagaimana telah dijelaskan di awal tulisan ini bahwa hubungan diplomatik antara pemerintah Jerman dan Indonesia telah dibuka sejak 1952. Hubungan politik antara kedua negara selama ini berjalan dengan baik dan penuh dengan kepercayaan¹¹. Jerman juga menghormati proses reformasi yang terjadi di Indonesia paska runtuhnya jaman Orde Baru di bawah pimpinan mantan Presiden Soeharto, walaupun pada jaman tersebut hubungan Jerman dan Indonesia bisa dikatakan sangat baik. Bahrin dalam makalahnya (2000) menyebutkan bahwa hubungan baik di antara kedua negara terbina sejak lama dan cukup hangat pada saat berkuasanya Presiden Soeharto (1967 – 1998) dan Kanselir Helmut Kohl. (1982 – 1998). Tercatat empat kali kunjungan Kanselir Kohl ke Indonesia, antara lain pada 1983, 1988, 1993 dan 1996, serta kunjungan Presiden Jerman Karl Carsten pada 1984. Sedangkan mantan Presiden Soeharto pernah dua kali melakukan lawatan kenegaraan ke Jerman, masing-masing pada 1991 dan 1995. Di samping banyaknya kegiatan saling kunjung dari kepala negara tersebut, tercatat pula kunjungan para pejabat tinggi seperti para menteri, ketua dan anggota Parlemen, Dirjen, Direktur serta pejabat tinggi lainnya termasuk pula rombongan dagang. Saling kunjung ini merupakan salah satu indikator betapa baiknya hubungan kedua negara. Lebih lanjut Bahrin menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pola pendekatan hubungan terhadap Indonesia pada masa Kanselir Helmut Kohl dan Kanselir Gerhard Schröder (1998 – 2005). Jika pada era Helmut Kohl pola pendekatan hubungan Jerman – Indonesia lebih banyak didasarkan pada hubungan pribadi antara Kanselir Kohl dan Preseiden Soeharto tanpa banyak memperhatikan masalah-masalah HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup. Sedangkan pola pendekatan yang dilakukan oleh Kanselir Gerhard Schröder lebih menekankan kepada tiga hal tersebut di atas. Meskipun terdapat pendekatan dalam hubungan bilateral antara kedua negara, namun hubungan tetap berjalan dengan baik karena dilandasi oleh hubungan pribadi yang begitu erat. Pada saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan B.J. Habibie (1998 – 1999) dan Jerman di bawah kepemimpinan Gerhard Schröder, hubungan kedua negara juga berjalan dengan baik karena adanya komitmen dari Presiden Habibie pada waktu itu untuk menata

¹¹ www.auswartiges-amt.de yang diakses pada 18 Oktober 2010 pada pukul 11.57 wib.

Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dan adanya upaya-upaya penyelesaian dan penghormatan terhadap masalah HAM. Selain itu faktor Habibie sebagai alumnus *Rheinische Westfälische Technische Hochschule*, sebuah perguruan tinggi yang berada di kota Aachen, Jerman, juga ikut berperan serta. Pergantian B.J. Habibie kepada Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 juga tidak merubah hubungan baik yang telah terbina selama ini karena adanya komitmen yang kuat dari Presiden Abdurrahman Wahid terhadap masalah-masalah demokratisasi dan masalah HAM. Kunjungan kenegaraan Presiden Abdurrahman Wahid ke Jerman pada Februari 2000 semakin memberikan dorongan yang kuat bagi terpeliharanya hubungan baik tersebut dan adanya komitmen yang tegas dari Jerman untuk membantu Indonesia yang telah menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara konsekuen, Jerman merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu perkembangan demokrasi di Indonesia, karena momentum situasi di tanah air telah memberi peluang kepada Jerman untuk memberi bantuan apa saja tergantung dari apa permintaan dan kebutuhan yang diperlukan oleh pihak Indonesia. Komitmen tersebut juga ditunjukkan melalui lawatan kenegaraan Kanselir Gerhard Schröder ke Indonesia pada 13 Mei 2003. Pada saat itu Indonesia sedang dipimpin oleh Presiden wanita pertama RI, Megawati Soekarno Putri. Pergantian kepemimpinan dari Schröder ke Kanselir Jerman saat ini Angela Merkel, tidak banyak merubah kebijakan luar negeri Jerman yang tetap memandang penting arti dari kebebasan, perlindungan HAM serta demokrasi. Pada November 2008 Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan di penghujung tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman dan bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Selain isu HAM, demokrasi dan lingkungan hidup, Jerman dalam dokumen *Aufgaben der deutschen Außenpolitik: Südostasien sowie Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln* (Tugas Kebijakan Luar Negeri: Asia Tenggara sebagaimana Australia, Selandia Baru dan Pulau-pulau Pasifik) yang dikeluarkan

oleh Kementerian Luar Negerinya pada 2002 juga menekankan bahwa Indonesia memiliki peran penting sebagai stabilisator keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini secara instrinsik menggambarkan kekuatiran Jerman terhadap pertumbuhan kelompok Islam garis keras di Indonesia. Kekuatiran tersebut muncul setelah aksi penyerangan teroris pada 11 September 2001, serta terjadinya serangkaian aksi terorisme di Indonesia, seperti aksi peledakan bom di Bali pada 2002 dan beberapa aksi serupa setelahnya di Jakarta. Jerman berpendapat jika kelompok tersebut terus dibiarkan tumbuh, maka itu dapat menjadi ancaman tersendiri bagi stabilitas keamanan baik di Indonesia sendiri serta stabilitas keamanan di kawasan. Dalam menanggapi isu ini, Jerman memanfaatkan instrumen organisasi ASEAN Regional Forum, sebagai media untuk berdialog dan berdiskusi untuk membicarakan masalah keamanan regional.

4.2. Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan

Saat ini terdapat kurang lebih 250 perusahaan Jerman yang melakukan usahanya di Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah distributor produk-produk buatan Jerman, namun banyak di antara mereka yang juga melakukan kegiatan produksi di Indonesia. Salah satunya adalah pabrik KSB AG yang baru-baru ini dibuka di Cibitung. Pabrik KSB AG sebenarnya sudah beroperasi di Indonesia sejak 1993 namun baru membuka pabrik produksi pada 2010. Pabrik ini memproduksi pompa dengan kualifikasi khusus seperti pompa untuk pekerjaan di tambang, pompa limbah air dan pompa untuk pemadam kebakaran. Acara pembukaan pabrik produksi KSB AG tersebut dihadiri oleh Duta Besar negara Jerman untuk Indonesia, Dr. Norbert Baas. Dalam sambutannya, Dr. Baas mengemukakan bahwa keputusan KSB untuk mendirikan pabrik produksi dan melakukan inovasi merupakan keputusan yang tepat. Sebab saat ini negara-negara yang tergabung dalam ASEAN termasuk Indonesia sedang mengalami perkembangan ekonomi dan menjadi penggerak perekonomian dunia bersama dengan Cina dan India¹². Hal ini berarti bahwa Jerman melihat adanya peluang pasar yang besar di Indonesia dan di kawasan Asia secara umum bagi produk-

¹² Dikutip dari <http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id> pada Senin, 1 November 2010 pada pukul 20.13 wib.

produk pompa tersebut. Selain itu, perusahaan otomotif Daimler/Mercedes Benz dan BMW juga melakukan perakitan mobil di Indonesia.

Jerman melihat bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia merupakan peluang yang besar. Hal ini disebutkan dalam dokumen *Marktanalyse Indonesien* (Analisis Pasar Indonesia) yang dipublikasi oleh iMOVE¹³ (2000:5):

Ein insgesamt besonderer Vorteil für den Im- und Export ist die günstige geostrategische Lage Indonesiens. Das Land liegt an einer wichtigen Stelle zwischen dem asiatischen Festland und Australien. Dennoch kamen Wachstumsanreize in den vergangenen Jahren fast ausschließlich aus dem Binnenkonsum. ...

Ada satu keuntungan tersendiri dalam kegiatan impor dan ekspor dengan Indonesia, yaitu letak geografis Indonesia yang strategis. Indonesia terletak pada titik penting di antara daratan Asia dan Australia. Meskipun demikian dalam beberapa tahun terakhir rangsangan pertumbuhan (ekonomi) berasal dari konsumsi domestik (Indonesia).

Dalam pernyataan di atas jelas sekali terlihat bahwa Jerman memiliki kepentingan dalam memelihara kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Selain karena posisi geografis Indonesia yang strategis karena berada di antara dua benua yang berbeda, Indonesia juga memiliki pasar domestik yang besar bagi produk-produk buatan Jerman.

Jerman merupakan mitra dagang ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika Serikat. Disusul kemudian oleh Singapura, Korea dan Inggris¹⁴. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terjadi peningkatan kegiatan ekspor dan impor barang-barang dari dan ke Jerman. Produk ekspor Jerman ke Indonesia menurut data dari Kementerian Luar Negeri Jerman antara lain mesin-mesin, bahan-bahan kimia setengah jadi maupun yang sudah jadi, telekomunikasi, alat-alat pembangkit listrik, komponen elektronik, metal, kendaraan bermotor dan produk-produk kimia. Sedangkan produk impor yang berasal dari Indonesia antara lain makanan seperti minyak nabati, tekstil, dan sepatu. Dari data statistik

¹³ iMOVE merupakan singkatan dari International Marketing of Vocational Education.

¹⁴ *International Marketing of Vocational Education (iMOVE), Marktanalyse Indonesien*, (Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2003), hal. 5.

yang dikeluarkan oleh Kantor Statistik Federal Jerman pada 2009 disebutkan bahwa ekspor barang Jerman ke Indonesia yang meliputi produk-produk permesinan dan perangkat mekanik mengalami peningkatan, yakni sebesar USD \$ 1.245 miliar pada tahun 2000, menjadi USD \$ 1.781 miliar pada tahun 2005 dan pada tahun 2008 menjadi USD \$ 3.069 miliar. Sedangkan impor barang dari Indonesia ke Jerman yang meliputi produk-produk yang berasal dari hewan dan tumbuhan serta minyak juga mengalami peningkatan, yakni sebesar USD \$ 1.443 miliar pada tahun 2000, kemudian meningkat menjadi USD \$ 1.782 miliar pada tahun 2005 dan pada 2008 menjadi USD \$ 2.465 miliar.

Tabel 9
Data Kegiatan Ekspor dan Impor Barang Jerman
ke Indonesia

	2000	2005	2008
Ekspor	USD \$ 1.245 miliar	USD \$ 1.781 miliar	USD \$ 3.069 miliar
Impor	USD \$ 1.443 miliar	USD \$ 1.782 miliar	USD \$ 2.465 miliar

Sumber: Kantor Statistik Federal Jerman 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa bagaimanapun juga Jerman diuntungkan dalam kegiatan ekspor dan impor dengan Indonesia. Khususnya data pada 2008 yang menunjukkan bahwa total ekspor Jerman ke Indonesia mencapai USD \$ 3.069 miliar. Hal tersebut juga menunjukkan adanya komitmen dari perusahaan-perusahaan Jerman meneruskan kegiatan baik kegiatan ekspor dan impor maupun kegiatan usahanya di Indonesia, meskipun pada 1997/1998 Indonesia dilanda krisis keuangan yang menyebabkan dampak yang cukup besar terhadap stabilitas keamanan, ekonomi dan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Brown (2001) tentang prinsip-prinsip etika dalam suatu kebijakan luar negeri, dapat kita simpulkan bahwa ada prinsip yang dipegang Jerman ketika ia mengambil kebijakan untuk meneruskan kegiatan usahanya di Indonesia ketika Indonesia dilanda krisis. Prinsip-prinsip itu

adalah keamanan dan kesejahteraan. Dalam hal ini Jerman berkepentingan terhadap kondisi Indonesia yang stabil sebab Jerman memiliki pasar yang cukup besar khususnya di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Dengan membiarkan Indonesia terpuruk dalam krisis, maka kegiatan ekspor Jerman ke Indonesia juga akan terganggu dan bukan tidak mungkin bahwa perusahaan-perusahaan Jerman yang ada di Indonesia juga terkena imbas, dan hal ini akan memberi dampak perekonomian yang cukup signifikan baik bagi Jerman maupun bagi Indonesia. Apabila perekonomian terganggu, maka kesejahteraan masyarakat juga akan terpengaruh. Sehingga dengan tetap berkomitmen untuk memelihara hubungan baik pada saat situasi di Indonesia sedang kurang baik, Jerman pada dasarnya memiliki agenda lain, yakni ingin mengamankan perekonomiannya di satu sisi dan mengamankan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dimaksud di sini ialah, apabila perusahaan-perusahaan Jerman yang ada di Indonesia ditutup, maka pegawai atau buruh Indonesia yang bekerja untuk perusahaan tersebut akan kehilangan pekerjaan sehingga akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Jika hal tersebut tidak diantisipasi, maka akan dapat menimbulkan masalah sosial lainnya, misalnya tindak kriminalitas dan sebagainya.

Saat ini terdapat tiga institusi yang digunakan sebagai instrumen pemerintah Jerman untuk membantu menjalankan kebijakan ekonominya, yaitu EKONID (Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman), GTAI (*Germany Trade and Invest*) dan German Centre.

EKONID merupakan organisasi untuk mewakili kepentingan perusahaan anggota. Selain itu EKONID juga memiliki fungsi untuk mempromosikan perdagangan bilateral dan investasi antara Jerman dan Indonesia. Salah satu tugas utama dari EKONID adalah memberi saran kepada perusahaan Jerman dan Indonesia dalam mengembangkan usahanya dan membantu mereka ketika memulai bisnis di Indonesia.

GTAI merupakan lembaga perdagangan dan investasi luar negeri yang baru dibentuk oleh pemerintah Jerman pada 1 Januari 2009. Keberadaannya di Indonesia bertujuan untuk mempromosikan Jerman sebagai lokasi investasi industri dan teknologi, serta untuk mengidentifikasi para investor untuk pasar

Jerman¹⁵. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi bagi perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi di Jerman, begitu juga sebaliknya memberikan konsultasi kepada perusahaan asal Jerman yang ingin berinvestasi di Indonesia.

German Centre Indonesia merupakan pusat kegiatan industri dan perdagangan Jerman yang didirikan di Bumi Serpong Damai pada 1999. Pusat ini menawarkan tempat produksi dan kantor dengan infrastruktur dan media komunikasi yang lengkap. Konsep pendirian *German Centre* berfungsi untuk menjembatani dan membantu keperluan bagi usaha kecil menengah (UKM) asal Jerman yang ingin memasuki salah satu pasar terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Hingga saat ini terdapat 55 perusahaan Jerman yang menempati *German Centre*¹⁶.

Dengan adanya tiga institusi tersebut, Jerman berkeinginan untuk dapat lebih melebarkan pangsa pasarnya di Indonesia.

4.3. Kebijakan Pembangunan

Indonesia merupakan negara yang menjadi prioritas dalam kerjasama pembangunan Jerman. Kerjasama pembangunan ini adalah instrumen kebijakan pembangunan yang disusun oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama dan Pembangunan (BMZ) Jerman. Kerjasama ini sudah dibina oleh kedua negara sejak tahun 1950an. Namun perjanjian kerjasama teknik dan keuangan baru diresmikan pada 1984¹⁷. Dalam kerjasama ini pemerintah Jerman melalui BMZ dan pemerintah Indonesia melalui Bappenas melakukan rapat konsultasi yang dilakukan setiap tahun.

Dalam dokumen *Indonesian – German Development Cooperation* yang dikeluarkan oleh Kedutaan Jerman di Jakarta pada 2002 disebutkan:

There are numerous motives for granting development assistance. Primarily, the moral obligation towards those who are disadvantaged in our One World. Furthermore, there are objectives in the common interest of Germany and its partners such as a long-term prospect for peace and stability based on

¹⁵ Dikutip dari <http://www.gtai.com> yang diakses pada 20 November 2010 pada pukul 18.06 wib.

¹⁶ <http://www.auswaertigesamt.de/DE/Laenderinformationen/Indonesien/Bilateral.html> yang diakses pada 20 November pada pukul 20.00 wib

¹⁷ iMOVE, *Marktanalyse Indonesien*, (Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2003), hal. 8.

prosperity of all nations. The latter is of crucial importance for Germany's export-oriented economy. The preservation of vital natural resources is another issue of global significance.

Ada berbagai motif untuk memberikan bantuan pembangunan. Yang terutama yaitu kewajiban moral terhadap mereka yang kurang beruntung dalam Satu Dunia ini. Selain itu, Jerman dan mitranya juga memiliki tujuan-tujuan bersama misalnya prospek jangka panjang bagi perdamaian dan stabilitas yang didasarkan pada kesejahteraan semua bangsa. Perdamaian dan stabilitas tersebut sangat penting bagi perekonomian Jerman yang berorientasi pada ekspor. Kelestarian sumber daya alam juga merupakan isu lain dalam kepentingan global.

Pernyataan “perdamaian dan stabilitas tersebut sangat penting bagi perekonomian Jerman yang berorientasi pada ekspor” terkait erat dengan kebijakan luar negeri Jerman dalam bidang ekonomi dengan Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (lihat halaman 12).

Dalam dokumen *Indonesian – German Development Cooperation* tersebut juga dijelaskan tentang tujuan kebijakan pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah Jerman.

German development policy aims at improving the economic and social situation of the developing countries and the deployment of their productive abilities with particular emphasis on the poorest sectors of the population, providing help for self help. In doing so, German development policy focuses on five main conditions ... they are (1) respect for human rights, (2) participation on the population in political decision making processes, (3) rule of law, (4) economy based on social market principles, (5) development oriented policies of the partner government.

Kebijakan pembangunan Jerman bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan situasi (kehidupan) sosial di negara-negara berkembang serta membantu menerapkan kemampuan produktif mereka dengan memberikan penekanan khusus kepada sektor masyarakat termiskin serta memberikan bantuan agar mereka dapat membantu diri sendiri. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Jerman difokuskan kepada lima hal ... yaitu (1) menghormati HAM, (2) partisipasi penduduk dalam proses pengambilan keputusan politik, (3) aturan hukum, (4) ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip pasar sosial, (5) kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada pemerintah yang menjadi mitranya.

Pernyataan di atas yang menyebutkan bahwa “kebijakan pembangunan Jerman bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sosial di negara-negara berkembang ... dengan memberikan penekanan khusus kepada sektor masyarakat termiskin serta memberikan bantuan agar mereka dapat membantu diri sendiri”, sedianya mengandung prinsip kesejahteraan sebagaimana yang disebutkan oleh Brown (2001:17). Jerman berkepentingan untuk ikut berpartisipasi memerangi kemiskinan, termasuk memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebab jika taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik yang dapat diartikan sebagai sejahtera, maka dapat diasumsikan bahwa daya beli masyarakat Indonesia juga akan ikut meningkat. Dal hal ini akan memberi pengaruh positif terhadap daya beli masyarakat terhadap produk-produk buatan Jerman.

Pelaksanaan tujuan kebijakan pembangunan Jerman tersebut akan disesuaikan dengan tujuan kebijakan pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah yang menjadi mitra kerjasama Jerman. Sampai saat ini terdapat empat bentuk kerjasama bilateral yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman dalam skema kerjasama pembangunan. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut antara lain (1) kerjasama teknik, (2) kerjasama keuangan, (3) bantuan personal, dan (4) pelatihan untuk sekolah kejuruan dan pelatihan professional.

Pertama kerjasama teknik. Pemerintah Jerman mendukung proses pembangunan di negara mitranya melalui kerjasama teknik. Tujuan kerjasama teknik ini ialah untuk membantu masyarakat dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan individu, untuk meningkatkan efisiensi kelembagaan serta efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam kerjasama ini pemerintah Jerman menyediakan tenaga yang terampil dalam bidang teknik, bidang ekonomi dan organisasi yang ditempatkan di kantor-kantor yang menjadi mitra kerjanya di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memberikan kontribusinya berupa hibah (dalam bentuk tenaga ahli) yang pelaksanaannya dilakukan oleh institusi Jerman GTZ¹⁸.

¹⁸ GTZ merupakan singkatan dari *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit*. GTZ merupakan badan usaha jasa dalam bidang kerjasama pembangunan dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada 1975 dan dimiliki oleh Republik Federal Jerman dan bergerak sebagai badan usaha sektor swasta yang mengemban amanat pembangunan. GTZ mengerjakan aktivitas atas nama klien utamanya yaitu BMZ serta mendukung proses

Kedua kerjasama keuangan. Di bawah skema kerjasama keuangan ini, pemerintah Jerman menyediakan bantuan keuangan bagi negara-negara berkembang berupa hibah dan/atau kredit, dengan syarat-syarat yang sangat menguntungkan. Bantuan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan negara mitranya namun juga disesuaikan dengan lima fokus bidang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jerman dalam kebijakan pembangunannya.

Ketiga bantuan personal. Bantuan personal ini diberikan oleh pemerintah Jerman yang disesuaikan dengan permintaan dari negara mitranya. Permintaan tersebut biasanya didasarkan pada proyek kerjasama yang sedang dijalankan oleh kedua negara. Misalnya dalam proyek kerjasama pengembangan alat pendeteksi dini tsunami Jerman-Indonesia. Dalam proyek tersebut, pemerintah Jerman menyediakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang tsunami atau kegempaan. Bantuan personal ini disediakan oleh lembaga Jerman, antara lain DED (*German Development Service*) dan CIM (*Centre of International Migration and Development*).

Keempat pelatihan untuk sekolah kejuruan dan pelatihan professional. Pelatihan ini diberikan baik di Jerman maupun di negara-negara berkembang. Bantuan dalam pelatihan ini dilaksanakan oleh dua organisasi Jerman, yaitu *Carl Duisberg Gesellschaft* (CDG) dan *German Foundation for International Development* (DSE). Kedua organisasi tersebut menyediakan program beasiswa dan pelatihan-pelatihan di berbagai bidang mulai dari bisnis, industri, infrastruktur, komunikasi, kesehatan dan pertanian.

Fokus kerjasama pembangunan antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia dalam praktiknya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut disesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik di tingkat global, regional maupun di tingkat nasional. Dinamika di tingkat nasional telah dipaparkan di awal

pembangunan dan reformasi atas nama Kementerian Jerman lainnya. GTZ memberikan paket bantuan komprehensif dalam bidang-bidang seperti kebijakan ekonomi, keuangan dan sosial, hukum dan administrasi pemerintahan, pembinaan sektor swasta dan konsultasi industri, pelestarian lingkungan, energi dan air, pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pembangunan perkotaan dan pedesaan. Isu lintas sektoral seperti kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan juga mendapat perhatian.

bab ini. Kerjasama pembangunan pada 2002¹⁹ difokuskan pada sektor, yaitu (1) good governance, (2) kesehatan dan keluarga berencana, (3) transportasi, (4) energi, (5) lingkungan hidup dan sumber daya alam / hutan, dan (6) pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan.

Sedangkan pada 2005 terdapat tiga bidang prioritas untuk kerjasama pembangunan²⁰, yaitu (1) mendukung kebijakan reformasi ekonomi, peningkatan perusahaan kecil dan menengah serta pelatihan kejuruan, (2) kesehatan mencakup pencegahan HIV/AIDS, dan (3) transportasi, khususnya transportasi laut dan rel kereta api.

Pada 2007 juga terdapat perubahan bidang prioritas dalam kerjasama pembangunan²¹, antara lain (1) perlindungan iklim, (2) dukungan terhadap sektor swasta, dan (3) tata pemerintahan yang baik/desentralisasi.

Tabel 10
Dinamika Kerjasama Pembangunan Jerman – Indonesia
2000 – 2009

No.	2002	2005	2007
1.	<i>Good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik)	Dukungan terhadap reformasi ekonomi, peningkatan UKM dan pelatihan kejuruan	Perlindungan iklim
2.	kesehatan dan keluarga berencana	Kesehatan, termasuk di dalamnya pencegahan penyakit HIV/AIDS	Dukungan terhadap sektor swasta
3.	Transportasi	Transportasi, khususnya transportasi laut dan rel kereta api	Tata pemerintahan yang baik / desentralisasi
4.	Energi	-	-
5.	Lingkungan hidup dan sumber daya alam /	-	-

¹⁹ Dokumen *Indonesian – German Development Cooperation* yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta pada 2002, hal. 4.

²⁰ Dokumen Kerjasama Pembangunan Uni Eropa di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta pada 2005.

²¹ www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/indonesien/zusammenarbeit yang diakses pada 10 Agustus 2010 pada pukul 16.00 wib.

	hutan		
6.	Pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan	-	-

Kerjasama pembangunan (*German Development Cooperation*) pada dasarnya baru dilaksanakan oleh Jerman pada sekitar tahun 1950an. Meningkatnya jumlah dan ruang lingkup kegiatan yang terkait dengan kerjasama pembangunan tersebutlah yang mendorong Jerman untuk mendirikan Kementerian Federal Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ²²). Pendirian kementerian baru tersebut tidak hanya dilandasi oleh alasan-alasan praktis namun juga karena berkembangnya kepentingan politik dalam bidang tersebut.

Untuk membantu pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Deklarasi Milenium, Jerman juga ikut berperan aktif dengan membuat Program Aksi Antar Kementerian tahun 2015 yang merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk menerjemahkan komitmennya menjadi praktik yang nyata. Pemerintah Jerman melaksanakan aksinya melalui kebijakan pembangunan dan visi pembangunan global yang berkesinambungan dengan beberapa tujuan, antara lain *pertama* mengurangi kemiskinan di seluruh dunia, *kedua* membangun kedamaian dan mewujudkan demokrasi, *ketiga* meningkatkan bentuk-bentuk globalisasi yang adil, dan yang *keempat* melindungi lingkungan hidup. Program Aksi tersebut memiliki sepuluh prioritas yang mencakup ekonomi dan pertanian, perdagangan, utang, sistem sosial, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, hak-hak azasi manusia, kesetaraan *gender*, partisipasi, pelucutan senjata serta keamanan²³.

Dalam negosiasi antar pemerintah yang diadakan pada 2 Oktober 2007 di Bonn disepakati tiga prioritas dalam kerjasama pembangunan Jerman dan Indonesia, antara lain *pertama* kerjasama dalam bidang perubahan iklim (*climate change*), *kedua* pembangunan sektor swasta (*private sector development*) dan *ketiga* kerjasama untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik/desentralisasi

²² BMZ: *Bundesministerium für Zusammenarbeit*

²³ Lihat dokumen Tujuan dari Kebijakan Pembangunan Jerman yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman Unit Kerjasama Pembangunan.

(*good governance/decentralization*)²⁴. Setiap tahunnya Jerman melalui BMZ mengucurkan dana bantuan berupa pinjaman dengan bunga pinjaman yang relatif ringan untuk kerjasama pembangunan ke Indonesia kurang lebih sebesar € 70 juta. Bank Indonesia (BI) dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2008, merilis bahwa hingga Desember 2008 posisi utang luar negeri Indonesia terhadap Jerman adalah sebesar USD 3,809 miliar.

Jerman merupakan negara donor terbesar keempat di antara para anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD). Pada tahun 2005, ODA (*Official Development Assistant*) bersih yang diberikan Jerman adalah sebesar € 8 miliar. Bagian terbesar dari jumlah tersebut dialokasikan ke Asia, yakni sebesar 40%, diikuti dengan Subsahara-Afrika sebesar 33%, Timur Tengah dan sekitarnya sebesar 23%, Amerika Latin sebesar 7% dan Eropa sebesar 5,3 %²⁵.

Pemerintah Jerman memandang pemberdayaan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga masyarakat melalui proses desentralisasi sebagai sebuah prasyarat utama bagi pembangunan politik, ekonomi dan sosial yang stabil dan juga bagi pengentasan kemiskinan. Pemerintah Jerman menganggap keberhasilan penerapan program desentralisasi di Indonesia sebagai sebuah syarat penting untuk mencapai dampak berkelanjutan dalam kerjasama pembangunan dengan Indonesia. Oleh karena itu kedua negara sepakat untuk secara bersama-sama menjadikan desentralisasi dan pemerintahan daerah sebagai tema penting dalam kerjasama pembangunan bilateral. Pada tingkat nasional terdapat tiga proyek Kerjasama Teknis Indonesia-Jerman yang terlibat dalam perumusan kebijakan untuk desentralisasi dan otonomi daerah:

²⁴ http://www.gdc-indonesia.org/index_en.html yang diakses pada 14 Oktober 2010 pukul 20:05 wib.

²⁵ Lihat dokumen Tujuan dari Kebijakan Pembangunan Jerman yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman Unit Kerjasama Pembangunan.

4. 4. Kebijakan Sains dan Teknologi

Perjanjian kerjasama dalam bidang S&T antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia telah ditandatangani sejak 20 Maret 1979²⁶. Itu berarti bahwa kerjasama dalam bidang ini sudah berusia 31 tahun. Eratnya hubungan kerjasama dalam bidang ini tidak dapat dilepaskan dari campur tangan BJ. Habibie. Kedekatan hubungannya dengan Jerman dimulai ketika ia menempuh pendidikan di Universitas *Rheinische Westfalische Technische Hochschule*, sebuah perguruan tinggi yang berada di kota Aachen, Jerman. Selama 10 tahun Habibie menempuh pendidikan di Jerman hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat *summa cum laude*²⁷. Kemudian ia bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman, sebelum memenuhi panggilan mantan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan menduduki jabatan sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan merangkap sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selama 20 puluh tahun, sebelum akhirnya diangkat menjadi wakil presiden pada 11 Maret 1998 dan pada 21 Mei 1998 dia diangkat menjadi Presiden RI menggantikan mantan Presiden Soeharto²⁸.

BJ. Habibie dan teknologi memang tidak dapat dilepaskan. Begitu juga dengan kerjasama S&T antara Indonesia dan Jerman juga tidak dapat dilepaskan dari campur tangannya yang selama 20 tahun menduduki jabatan sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala BPPT. Dia juga yang melahirkan kerjasama S&T antara Jerman dan Indonesia.

Kerjasama tersebut bertujuan untuk melakukan dan mengembangkan riset secara bersama-sama. Kedua belah pihak secara berimbang akan memberikan

²⁶ Dokumen „*Agreement on co-operation in the fields of scientific research and technological development (with exchange letters)*” yang ditandatangani oleh Jerman dan Indonesia pada 1979.

²⁷ *Summa cum laude* adalah gelar kehormatan akademis tertinggi yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa dalam bidang akademis. Terdapat tiga gelar kehormatan sesuai dengan urutannya, antara lain *cum laude* yang berarti dengan pujian, *magna cum laude* yang berarti dengan pujian besar serta *summa cum laude* yang berarti dengan pujian tertinggi.

²⁸ Dikutip dari <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/wapres/id> yang diakses pada 8 November 2010 pada pukul 19.27 wib.

sumbangan, baik keterlibatan ilmiah maupun perhatian kebutuhan anggaran. Adapun topik-topik kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut antara lain:

(a) *Marine research and technology*, (b) *energy research and technology*, (c) *aeronautics and space research and technology*, (d) *geosciences*, (e) *social sciences and humanities*, (f) *science and technology suitable to provide a basis for industrial development* dan (g) *scientific information and documentation*²⁹.

(a) Riset dan teknologi kelautan, (b) riset dan teknologi bidang energi, (c) riset dan teknologi kedirgantaraan dan antariksa, (d) ilmu bumi, (e) ilmu pengetahuan social dan humanitas, (f) sains dan teknologi yang tepat untuk menyediakan dasar bagi pengembangan industri, dan (g) informasi dan dokumentasi ilmiah.

Dalam periode 2000 – 2009 terdapat beberapa program baru yang dikembangkan oleh kedua negara. Program tersebut antara lain (1) SPICE (*Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem*), (2) studi awal untuk merancang *master plan* kelautan Indonesia, pengembangan sistem peringatan dini tsunami, riset panas bumi (*geothermal*), (3) bioteknologi, (4) studi Periskop (Program Evaluasi Riset Sains Teknologi untuk Pembangunan), (5) program intermediasi BTC (*Business Technology Center*) yang berfungsi untuk mendorong hasil-hasil riset dapat digunakan oleh usaha kecil menengah (UKM), (6) STORMA (*Stability of Rainforest Margins in Indonesia*), (7) program-program internasional yang terdiri atas workshop Indonesia – Jerman dengan tema “*Research and Development Cooperation on Environmentally-Friendly Clean Energy Technologies*”, workshop dengan tema Penguatan Sistem Inovasi Nasional Indonesia, *mobility program* yaitu program beasiswa selama dua bulan bagi peneliti Indonesia untuk dapat melakukan penelitian di Jerman, serta program peningkatan sumber daya manusia), (8) pengembangan alat pendeteksi dini bencana tsunami, dan (9) pengembangan energi terbarukan yaitu energi panas bumi.

Kebijakan S&T Jerman terhadap Indonesia pada dasarnya merujuk kepada *Asia Concept 2002*, sebuah kebijakan yang disusun oleh BMBF dalam menghadapi persaingan global pada abad 21 (lihat bab 3, hal. 13). Dalam konsep

²⁹ *ibid*

itu disebutkan bahwa Jerman melihat Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan sumber daya hayati. Jerman berpendapat bahwa jika Indonesia dapat memanfaatkan dan menggunakan potensi kekayaan tersebut dengan maksimal, maka kehidupan perekonomian di Indonesia akan meningkat. Sayangnya belum semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh Indonesia sehingga dengan menjalin kerjasama S&T dengan Indonesia, Jerman berharap dapat membantu Indonesia untuk mengeksplorasi potensi yang ada sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia melalui hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

Brown dalam teorinya tentang etika dalam kebijakan luar negeri menyebutkan bahwa berperilaku etis berarti menyadari dan peka terhadap kepentingan orang lain tetapi bukan sebuah kewajiban untuk mengorbankan diri. Memang ada situasi di mana individu tertarik untuk mengorbankan diri tetapi hal tersebut menurut sebagian besar kode etik adalah berlebihan, sehingga berperilaku etis adalah sesuatu yang akan baik jika dilakukan tetapi tidak salah jika tidak dilakukan. Lebih lanjut Brown menyebutkan bahwa sebuah aksi dapat digambarkan sebagai beretika apabila motifnya murni. Jika ada sebuah kasus di mana sebuah negara mungkin mengklaim dirinya bersikap etis, ini berarti bahwa negara tersebut sebenarnya tidak pernah berlaku etis karena selalu ada kepentingan pribadi yang ada dalam setiap aksi yang diambil negara tersebut. Apabila sebuah negara memiliki motivasi diri sehingga menjadi memiliki sikap moral, hal ini berarti bahwa negara tersebut termasuk sebagai negara yang sangat egois, di mana hal tersebut sangat dikutuk oleh teori etika.

Brown (2001:26) menyebutkan bahwa sebuah dimensi etika dalam kebijakan luar negeri ialah bagian yang terkandung dalam gagasan keanggotaan dalam masyarakat internasional. Negara memiliki tugas untuk mengejar kepentingan rakyatnya tetapi dalam konteks satuan tugas yang lebih luas terhadap negara lain, melalui negara lain, seluruh umat manusia. Kedua tugas tersebut mengandung obligasi moral dan merupakan sebuah kesalahan jika berpikir bahwa yang pertama hanyalah berdasarkan kepentingan semata dan yang kedua merupakan dimensi etika dalam kebijakan luar negeri. Kadang-kadang tugas moral sebuah negara terhadap warga negara mereka sendiri mungkin tampak

bertentangan dengan kewajiban etis yang dimiliki negara tersebut terhadap dunia yang lebih luas. Bentrokan antara tugas untuk warga negara dan tugas-tugas kepada orang asing tidak dapat diselesaikan dengan mengacu kepada beberapa kalkulus yang diambil dari filsafat moral tetapi hanya dapat diselesaikan melalui argumen politik yang melibatkan isu-isu langsung.

Jerman sebagaimana disebutkan dalam *Asia Concept 2002* menerima tanggung jawab internasionalnya dalam kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan dan riset. Kerjasama tersebut memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah global dan pembangunan ekonomi serta masalah sosial dan budaya bagi mitra kerjasamanya. Hal ini kiranya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Brown yang menyebutkan bahwa berperilaku etis berarti menyadari dan peka terhadap kepentingan orang lain. Namun pemerintah Jerman juga memiliki tugas moral untuk memenuhi kepentingan rakyatnya, yang juga berarti untuk memenuhi kepentingan negaranya, yaitu mengembangkan S&T. Keterbatasan wilayah dan SDA yang dimiliki Jerman, membuat negara tersebut harus mencari cara untuk dapat memenangkan persaingan global, dan salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan mengembangkan S&T. Perekonomian Jerman sebagian besar ditopang oleh industri yang berbasis teknologi. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah Jerman mendorong industri, para peneliti dan mahasiswa di negaranya untuk dapat meningkatkan pengembangan inovasi untuk menghasilkan produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dengan bekerjasama dalam bidang S&T dengan Indonesia, Jerman pada hakekatnya memiliki visi untuk ikut berperan serta dalam transfer teknologi dan transfer pengetahuan kepada masyarakat Indonesia³⁰. Melalui transfer teknologi dan transfer pengetahuan, Jerman ingin berpartisipasi mendorong peningkatan hasil-hasil riset untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga melalui kegiatan peningkatan hasil riset tersebut, maka akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

³⁰ Wawancara dengan Dr. Christian Stienen.